

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran Ketimpangan agregat yang dikenal dengan Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai nol sampai satu. Jika Indeks Gini bernilai nol berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai satu berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

Alesina dan Rodrik (1994) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang mahal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ketimpangan pendapatan sudah diteliti sebelumnya, namun belum jelas apakah faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sebab sampai sekarang ketidakmerataan pendapatan masih terus terjadi.

Pada kenyataannya terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, namun indeks gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak

bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan).

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Kemiskinan diidentifikasi sebagai pola hidup yang rendah, maksudnya yaitu keadaan yang dimana kehidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokoknya. Secara umum, kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Kemiskinan yang semakin meluas serta angka yang tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan (Todaro *et al.*, 2015).

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat (Bappenas, 2018).

Bappenas (2014) mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar

yaitu:

- Terpenuhiya kebutuhan pangan
- Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan
- Rasa aman dari perlakuan dan ancaman tidak kekerasan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Indikator Ketimpangan Pendapatan

Menurut Badan Pusat Statistik, Kurva Lorenz menjadi dasar dari Indeks Gini. Kurva Lorenz merupakan sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{c_{i-1}})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

f_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{C_i} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{C_{i-1}}$ = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i - 1).

Berikut adalah arti dari nilai besaran Koefisien Gini menurut Oshima (1976), yakni:

- $G < 0,3$ = Ketimpangan rendah
- $0,3 < G < 0,5$ = Ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Disparitas pendapatan antar daerah juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965. Williamson meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi. Formula Indeks Williamson bisa dituliskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2 \frac{x_i}{n}}}{\bar{r}}$$

Keterangan:

r_i = PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di daerah i

\bar{r} = Rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di daerah

x_i = Jumlah penduduk di daerah i

n = Jumlah penduduk daerah keseluruhan

Kriteria Indeks Williamson menurut Permendagri No.54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Jika $IW < 0,5$ → Ketimpangan rendah.
2. Jika $IW \geq 0,5$ → Ketimpangan tinggi

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2019) konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu:

1. *Head Count Index* merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.2. *Natural Resource Curse Hypothesis* (Hipotesis Kutukan Sumber Daya Alam)

Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap

mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Sumber daya alam (*natural resources/endowment factors*) pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

- Sumber daya alam yang tidak pernah habis (*Renewable-perpetual Resources*). Jenis sumber daya alam yang masuk kategori ini selalu tersedia sepanjang waktu, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.
- Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*Non-renewable or exhaustible resources*). Jenis sumber daya ini meliputi sumber daya alam yang mensuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batubara serta mineral yang bukan energi.
- Sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui (*Potentially Renewable Resources*). Kategori sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat, namun demikian lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah (Yakin, 1997).

Hipotesis kutukan sumber daya alam menunjukkan bahwa sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik sehingga berdampak negatif pada perekonomian. Menurut Gylfason (dalam Zaini, 2017) empat hal yang menyebabkan sumber daya alam tidak mempengaruhi kesejahteraan:

- Sektor sumber daya alam cenderung menggunakan tenaga kerja dan modal yang berkualitas rendah.

- Negara yang kaya sumber daya alam cenderung *overconfident*
- Sumber daya alam dianggap menjadi aset yang paling penting sehingga melupakan akumulasi modal manusia.
- Negara dengan sumber daya alam yang melimpah relatif lebih besar melakukan kesalahan dalam mengalokasikan anggaran. Sumber daya alam yang melimpah tidak menjadi jaminan bahwa suatu daerah sejahtera. Daya dukung sumber daya alam yang tergolong tinggi menunjukkan adanya variasi daya dukung sumber daya alam yang disebabkan oleh adanya keragaman sektor unggulan sehingga perkembangan ekonomi bervariasi dan tidak terdapat pola yang signifikan antara daya dukung sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Kurniawan, 2005).

Pengaruh sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh cara pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pada umumnya, negara-negara yang kaya sumber daya alam pertumbuhan ekonominya cenderung lambat. Namun, beberapa negara yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam masuk dalam kategori negara dengan penduduk berpendapatan tinggi (*World Bank* dalam Zaini, 2017). Sumber daya alam berdampak positif terhadap perekonomian sebagian kecil masyarakat yaitu memberikan peluang kerja dan peluang usaha. Hal tersebut menunjukkan negara yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alamnya dapat berdampak positif terhadap perekonomian (Wright dan Czelusta dalam Zaini, 2017).

2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas-aktivitas yang berkembang di dalam suatu perekonomian yang menjadikan produksi barang dan jasa di masyarakat bertambah dan kesejahteraan masyarakat naik (Sukirno, 2000). Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu diperoleh dengan data laju pertumbuhan produk domestik regional bruto. PDRB adalah jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha pada suatu waktu tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dapat menggunakan tiga proksi, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

Menurut Bank Indonesia (dalam Dewi, 2019) PDRB Atas Harga Berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHB menunjukkan struktur ekonomi suatu daerah, pergeseran, dan sumber daya ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Menurut penelitian Afrizal (2013) nilai PDRB yang tinggi di suatu daerah menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen

(faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat dampak kemajuan hasil pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia merupakan gabungan dari tiga dimensi yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia menjadi indikator yang banyak digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia dan melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia merupakan gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Indeks pembangunan manusia dalam pelaksanaan program pembangunan berfungsi memberikan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks standar hidup layak.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan adalah metode *Pooled Least Square*. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya alam batubara yang cukup besar dan bernilai di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tidak terdistribusi secara merata kepada penduduk di wilayah tersebut dikarenakan sumber daya alam batubara dikelola dengan baik oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan penguasaan teknologi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dengan ketimpangan pendapatan yang berarti bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di wilayahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fachlevi *et al.*, (2015) bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara yang terjadi di lima desa di Kecamatan Mereubo. Penelitian ini menggunakan metode analisis dampak ekonomi lokal dengan menghitung nilai efek pengganda (*multiplier effect*) dari kegiatan pertambangan dan metode valuasi ekonomi untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan nilai pengganda (*multiplier effect*) sebesar 1,14 artinya kegiatan pertambangan batubara telah mampu memberikan dampak ekonomi secara lokal. Secara sosial, masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kehadiran perusahaan pertambangan batubara.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro dan Nafis (2010) bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi *growth without development* di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan - penggalian tetap merupakan sektor unggulan utama di Kalimantan Timur, baik sebelum maupun selama otonomi daerah berlangsung. Subsektor unggulan di Kalimantan Timur terdiri dari subsektor kehutanan, pertambangan minyak dan gas, industri pengolahan nonmigas, dan perdagangan besar-eceran. Transformasi struktural tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mengalami gejala *growth without development*.